



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2023—2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta jalan dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa pemerintah daerah belum mempunyai pengaturan mengenai peta jalan dalam rangka pengendalian inflasi daerah Tahun 2023—2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023—2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023—2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
4. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

Pasal 2

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023—2024 merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Daerah selama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Pasal 3

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023—2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023—2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Februari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 285

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH TAHUN 2023—2024

PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023—2024

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target		Person in Charge	
				2023	2024		
1	Ketersediaan Pasokan	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	1.	Menjaga ketersediaan beras medium dalam jumlah yang cukup sebagai cadangan beras pemerintah	18.000 Kg	20.000 Kg	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			2.	Jumlah produksi daging	146.634 kg	149.567 kg	
			3.	Pengembangan lumbung pangan			
				- wilayah lumbung pangan daerah	Kecamatan Kasemen dan Walantaka	Kecamatan Kasemen dan Walantaka	
				- pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit</i> (RMU)	1 unit	1 unit	
				- bantuan kemasan olahan pangan	10 kwt	10 kwt	
				- bantuan hidroponik pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	31 kwt	5 kwt	
				- bantuan demplot cabe dan melon	4 unit	7 unit	
			4.	Modernisasi sarana dan prasarana perikanan dari hulu ke hilir			
				- pemberian jaring kampus	10 klp	10 klp	

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target		Person in charge
				2023	2024	
			- pemberian benih lele dan nila	20 klp pokdakan	10 klp pokdakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			- pemberian benih bandeng (nener)	2 klp	2 klp	
			- pemberian bantuan mesin kapal tradisional (dompleng/tempel)	10 unit	5 unit	
			- pemberian mesin pompa air untuk pokdakan	5 unit	5 unit	
			- pemberian bantuan domba	50 ekor	50 ekor	
			- pemberian bantuan entog	100 ekor	100 ekor	
			- pemberian cator	5 unit	5 unit	
			- pemberian mesin jahit karung	5 unit	5 unit	
			- pemberian pallet bantalan gabah	5 unit	5 unit	
			- pemberian troli pengangkut gabah	5 unit	5 unit	
			- bantuan benih sayuran	3 kwt	3 kwt	
			- bantuan alat mesin pertanian	5 unit	6 unit	
			- bantuan pupuk kimia	1540 kg	1540 kg	
			- bantuan benih padi	9.400 kg	9.400 kg	
			- bibit tanaman hortikultura	1.000 batang	1.000 batang	
			- bibit tanaman hortikultura	100 sachet	100 sachet	
		5.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kota			
			- jumlah benih/bibit atau yang bersertifikat	25 ton	25 ton	
			- jumlah luasan penangkaran benih atau bibit tanaman padi yang tersedia	2 ha	2 ha	

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target		Person in charge			
				2023	2024				
		Memperkuat Produksi Cadangan Pangan	1.	Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan melalui pelatihan pengelolaan makanan dan aneka pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
				- pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran perikanan (praktek pembuatan <i>nugget</i>)	80 orang (10 klp)	80 orang (10 klp)			
				- bimbingan teknis dan pembinaan olahan pangan lestari	90 orang	90 orang			
			2.	Pelatihan mitra kerja (petani)					
				- pembinaan kesehatan hewan (Keswa) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kemavet)	4 kali	4 kali			
				- bimbingan teknis lumbung pangan masyarakat	1 kali	1 kali			
				- bimbingan teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	150 org	150 org			
				- pelatihan tematik	12 kali	18 kali			
			3.	Inovasi kegiatan					
				- kampung domba	2 lokasi	2 lokasi			
			- sentra telur asin	1 lokasi	1 lokasi				
		4.	Penguatan cadangan pangan pemerintah dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	CBP minimal 5.000—6.000 ton/tahun					
		Memperkuat Kelembagaan	Optimalisasi kelembagaan mitra kerja						Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
				- penguatan kelembagaan keamanan pangan segar	1 kali	1 kali			

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja		Timeline Target		Person in charge	
					2023	2024		
				- penyuluhan	1 kali	1 kali		
				- pertemuan teknis kelembagaan	6 kali	6 kali		
		Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok		Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	1 dokumen data distributor dan toko	1 dokumen data distributor dan toko	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Memperkuat Produksi, Cadangan Pemerintah dan Pengelolaan Ekspor Impor Pangan		Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	240 pengembangan usaha mikro makanan, kerajinan dan konveksi	240 pengembangan usaha mikro makanan, kerajinan dan konveksi		
		Memperkuat Kelembagaan	1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	35 pelaku usaha difasilitasi sertifikasi halal/uji masa simpan/ pendaftaran hak merek	35 pelaku usaha difasilitasi sertifikasi halal/uji masa simpan/ pendaftaran hak merek		
					150 orang pelatihan IKM	150 orang pelatihan IKM		
			2.	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi				
					- bimbingan teknis pengembangan usaha mikro makanan	80 usaha mikro		80 usaha mikro

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja		Timeline Target		Person in charge		
					2023	2024			
				- bimbingan teknis pengembangan usaha mikro kerajinan	80 usaha mikro	80 usaha mikro	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
				- bimbingan teknis pengembangan usaha mikro konveksi	80 usaha mikro	80 usaha mikro			
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	1.	Persentase ketersediaan bahan pokok di tingkat agen	98,4	98,4			
			2.	Pemantauan kesehatan hewan dan jumlah populasi korban					
				pemantauan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah dipotong	1 momen	1 momen			
Meningkatkan Infrastruktur		Pemeliharaan irigasi	8.750 m	8.750 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.	Keterjangkauan Harga	Stabilitas Harga	1.	Pelaksanaan bazar se-Kota Serang			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
				- bazar hasil produk hasil peternakan	1 kali	1 kali			
				- pasar tani	2 kali	2 kali			
			2.	Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar tradisional, toko dan swalayan se-Kota Serang					

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target		Person in charge
				2023	2024	
			- pemantauan neraca bahan pangan	12 kali	12 kali	
			- sistem pemantauan stok pangan	12 kali	12 kali	
			- pengambilan sampel daging di pasar	24 kali	24 kali	
		3.	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			Badan Urusan Logistik
			Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras dengan melaksanakan penyaluran beras medium pada pasar dan lingkungan di luar pasar setiap hari berdasarkan permintaan toko atau kios dan distribusi di wilayah Kota Serang	Penyaluran KPSH 3.000—5.000 ton/tahun		
			Memperluas jaringan distribusi pangan ke seluruh desa dan kecamatan di wilayah kerja Kota Serang	Estimasi jumlah RPK = 100 RPK/tahun di setiap desa		
			Berperan serta dalam menyalurkan program sembako di wilayah Kota Serang	Penyaluran KPSH 1.000 ton/tahun		
	Mengelola Permintaan		Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus	6 kali operasi pasar	kali operasi pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			panjang marka jalan	2.000 m	2.000 m	
			jumlah rambu terpelihara	57 unit	57 unit	
			jumlah rambu	20 unit	20 unit	
			jumlah lampu lalu lintas	1 titik	1 titik	

No.	4K	Program Strategis	Program Kerja		Timeline Target		Person in charge	
					2023	2024		
4.	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Koordinasi Pusat	1.	Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	3 kali	3 kali	Sekretariat Daerah Kota Serang	
			2.	Rapat koordinasi daerah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	3 kali	3 kali		
		Memperbaiki Kualitas Data	Pengembangan kota cerdas (<i>smart city</i>) menuju <i>smart economic</i>					
			1.	Pengembangan aplikasi <i>market place</i> di Kota Serang yaitu gelati bagi UMKM Kota Serang	Evaluasi dan pengembangan aplikasi 500 pelaku UMKM	Target pengguna gelati capai 10.000 orang yang melakukan transaksi 750 pelaku UMKM	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					200 pelaku UMKM	750 pelaku UMKM		
			2.	Pemantauan harga dan stok kebutuhan barang pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN